

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si, Apt
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif

Selanjutnya disebut pihak pertama

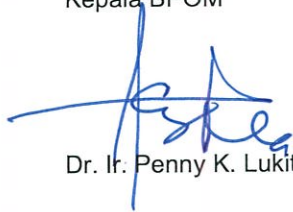
Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua
Kepala BPOM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jakarta, 6 Januari 2017

Pihak Pertama
Plt. Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan NAPZA



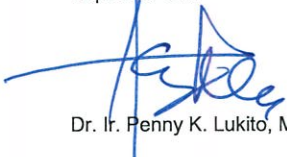
Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat	Persentase obat yang memenuhi syarat	93
	1.1 Tersusunnya standar obat dalam rangka menjamin obat yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu	1. Jumlah standar obat yang disusun 2. Jumlah rekomendasi laporan Uji Bioekivalensi yang selesai dievaluasi	10 40
	1.2 Meningkatnya mutu sarana produksi produk terapetik sesuai CPOB terkini	1. Persentase hasil inspeksi dengan temuan kritikal yang ditindaklanjuti tepat waktu	75
	1.3 Tersedianya obat memenuhi standar	1. Persentase keputusan penilaian obat dan produk biologi yang diselesaikan	77
	1.4 Meningkatnya mutu sarana distribusi dan keamanan produk terapetik beredar	1. Persentase peningkatan PBF yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	82
		2. Jumlah kajian farmakovigilans obat beredar yang dikomunikasikan	14
		3. Persentase iklan dan penandaan obat beredar yang memenuhi ketentuan	93
	1.5 Menurunnya jumlah sarana pengelola narkotika, psikotropika dan prekursor yang berpotensi melakukan diversifikasi narkotika, psikotropika dan prekursor	1. Persentase penyelesaian pemberian sanksi tindak lanjut tepat waktu terhadap sarana pengelola yang tidak memenuhi ketentuan	75
		2. Persentase permohonan rekomendasi Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk impor/ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	82
	1.6 Meningkatnya label iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	1. Persentase label iklan produk tembakau yang memenuhi ketentuan	55
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	12
	2.1 Pelaku usaha menjamin mutu obat	1. Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	12

Total anggaran : Rp 47.759.057.000

Pihak kedua
Kepala BPOM



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jakarta, 6 Januari 2017
Pihak Pertama
Plt. Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan NAPZA



Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si, Apt

JANJI KINERJA DAN INTEGRITAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid.
NIP : 196701311993032001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / Gol. IV/c
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA

Selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**;

2. Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
NIP : 19631109 199003 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama / Gol. IV/e
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut sebagai **pihak kedua**

Telah melakukan perjanjian kinerja individu antara **pihak pertama** dengan **pihak kedua** dalam rangka mewujudkan target kinerja individu tahun 2017 sebagaimana lampiran yang tak terpisahkan dari surat pernyataan Janji Kinerja dan Integritas ini.

Pihak pertama berjanji bekerja dengan jujur, profesional, proaktif berorientasi pada inovasi/perubahan; membuka jejaring/ kemitraan dengan pemangku kepentingan dengan teguh integritas.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dan apabila **pihak pertama** tidak dapat memenuhi target yang telah disepakati antara **pihak pertama** dan **pihak kedua**, maka **pihak pertama** bersedia menerima konsekuensi dipindahkan atau di berhentikan dari jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku.

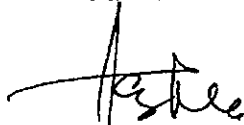
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, baik langsung maupun tidak langsung melalui atasan langsung **Pihak pertama**, serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target kinerja yang telah disepakati antara **pihak pertama** dan **pihak kedua**, selanjutnya **pihak kedua** akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Demikian pernyataan janji kinerja individu ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Jakarta, 3 Mei 2017

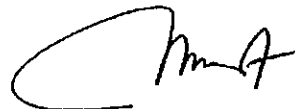
Para pihak yang melakukan Perjanjian Kinerja dan Integritas

Pihak Kedua



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Dra. Nurma Hidayati, Apt., M.Epid.

LAMPIRAN
JANJI KINERJA DAN INTEGRITAS
TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA

NO	KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JANGKA WAKTU	2017					2018	
				Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2
1	Fasilitasi hilirisasi pengembangan obat (biosimilar, sel punca) untuk mendukung program JKN a. Forum komunikasi dengan pelaku usaha, akademisi dan lembaga riset b. Bimbingan teknis regulasi dalam pengembangan obat (IHD) c. MOU dengan Kementerian Dikti	Terselenggaranya Forum Komunikasi	1x			1x			1x	1x
		Terselenggaranya Bimbingan Teknis	1x						1x	1x
		Terselainya MOU	1 Dokumen			30%	60%	100%		
2	Penguasaan Produk Darah untuk mendukung Kemandirian Produk Darah Dalam Negeri a. Penyusunan regulasi terkait penerapan Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah dan Plasma Feresis b. Asistensi Regulasi peningkatan pemenuhan persyaratan c. Forum komunikasi dengan UTID, Kemkes, Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota, Pengurus PMI d. Sertifikasi UTID sebagai penyedia plasma darah yang berkualitas e. MOU dengan PP PMI	Tersusunnya Regulasi	1 Dokumen			50%	75%	100%		
		Jumlah UTID yang disistensi	5			2		5		
		Terselenggaranya Forum Komunikasi	1x						1x	1x
		Jumlah UTID yang disertifikasi	2					2		
		Terselainya MOU	1 Dokumen			25%	50%	75%	100%	
3	Delegulasi/ Simplifikasi Pelayanan publik (sertifikasi CPOB dan registrasi obat) untuk mendukung a. Pelayanan prima pendaftaran obat b. Simplifikasi evaluasi dokumen GMP dalam rangka registrasi obat impor c. Finalisasi Perka BPOM tentang Sertifikasi CPOB	Pelatihan evaluator dan pendaftar	2x				1x	1x		
		Pemenuhan timeline evaluasi dokumen GMP	100%			50%	75%	100%		
		Terselainya Perka	1 Dokumen			50%	75%	100%		
4	Debitokratisasi/ Simplifikasi prosedur perijinan a. Revisi Perka BPOM tentang Tata Cara dan Kriteria Registrasi Obat (Buku Cetak) b. Diseminasi Perka BPOM tentang Tata Cara dan Kriteria Registrasi Obat (Buku Cetak) c. Harmonisasi Peraturan tentang pemasukan obat penggunaan khusus melalui Special Access Scheme (SAS) dengan Kemkes d. FGD dengan Pelaku Usaha untuk persamaan persepsi	Tersedianya Perka	1 Dokumen			80%	100%	2x	4x	
		Tersedianya Diseminasi	2x							
		Tersedianya draft peraturan	50%			10%	20%	30%	50%	
5	Implementasi Inpres No 3/2017 a. Peningkatan cakupan pengawasan obat dan NAPZA di sarana pelayanan kelurahan (saryantel) b. Forum komunikasi dengan Balai POM dalam rangka pemantapan pengawasan obat c. ToT kepada pelugas BB/BPOM di seluruh Indonesia d. Bimbingan teknis bagi Pelugas Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota e. Pemetaan Obat ilegal di Indonesia	Terselenggaranya FGD	2x			1x	1x			
		Efektifitas implementasi Inpres No 3/2017	35%				15%	35%	75%	100%
		Sarana Distribusi dan Saryantel yang diawasi	1x			1x				
		Terselenggaranya Forum Komunikasi	31 BB/BPOM			30%	60%	100%		
		Terselenggaranya ToT	1x			1x				
Tersedianya Data obat ilegal	1 Dokumen			10%	50%	90%	100%			


6	Intensifikasi pengawasan terpadu obat program nasional JKN a. Koordinasi dengan LKPP, Kementerian (Dijeri P2PL dan Dijeri Farmakes) dan Dinkes dalam rangka sampling obat JKN di sarana pelayanan kesehatan b. Koordinasi dan monitoring sampling dan pengujian obat JKN lebih ke hulu di 9 propinsi oleh BB dan Balai POM yang daerahnya terdapat Industri Farmasi c. Intensifikasi inspeksi di sarana produksi obat program nasional JKN	Terselenggaranya koordinasi	2x			1x	1x					
		Terselenggaranya koordinasi	1			1x						
		Terselenggaranya Pengawasan Sarana Produksi Obat JKN	100%		25%	50%	100%					
7	Revisi Regulasi a. PP 72 b. Peraturan Kepala Badan POM tentang Penjualan Obat secara Online	Tersusunanya draft		draft	10%	20%	30%	40%	50%	100%		
		Tersusunanya draft		draft				25%	50%	100%		
8	Konsolidasi Peningkatan Integritas Internal Kedepujian 1 a. Rapat Koordinasi Staf Bulanan b. Evaluasi Kinerja Kedepujian 1 c. Penyusunan janji kinerja dan integritas seluruh personil	Terselenggaranya rapat koordinasi		7 x		1x	3x	3x	12x	12x		
		Terselenggaranya forum evaluasi		1 Dokumen				1	1	1	1	
		Tersedianya Janji Kinerja dan Integritas		1 Paket					1	1	1	

Jakarta, 3 Mei 2017

Pihak Kedua


Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama


Dra. Numa Hidayati, Apt, M. Epid